

Dr. Samsuri



# **PENDDDIKAN KARAKTER WARGA NEGARA**

Kritik Pembangunan Karakter Bangsa



SAMSURI, lahir di Bangorulis, Indramayu, pada 18 Juni 1972. Pendidikan dasar di Bangorulis, Indramayu (SD Negeri Bangorulis) pada 1988; SMP Negeri Bangorulis pada 1989; Lulus SPG Negeri Indramayu pada 1991. Menyelesaikan studi sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (FMP-KN) FPIKS IKIP Yogyakarta pada 1997. Menyelesaikan kajian Islam pada Program Magister S2 Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 2000. Peman mengikuti program doktoral (S3) pada Program Studi dan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (sejak 2001), kemudian mengundurkan diri pada 2007). Menyelesaikan studi program doktoral (S3) pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengabdian Sosial (PIS) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2010). Belajar dasar tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta (URY). Kajian Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan kini menaungi bidang keilmuan yang ditelitiannya. Kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain pernah aktif dan masih aktif sebagai pengantar jurnal ilmiah: *Militer, Jurnal Studi Agama (MST)* (Juli 2001-2005); *Jurnal Qadim (JIN)* (2004-sekarang); *Ada Cetus (P-G)* (Jin SPs UPI, 2007-2009), serta sebagai anggota badan Himpunan Sastra Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (ISPINI) sejak 2010.



Tiba-tiba semua orang menjadi ahli "pendidikan karakter." Indikasi ini tampak merambat dan beberapa saat sebelum evaluasi keblakakan. Kemenerian Pendidikan Nasional dalam kabinet Indonesia Bersatu II antara lain mengeluarkan program penanaman karakter dan sikap mulia untuk semua jenjang sekolah. Diikuti dari konsep-konsep dan teori-teori, dengan perspektif yang beragam (mempunyai kerangka dasar, nilai, tradisi, dan ajaran), hingga pedoman-beberapa model berbasis teknis, pendidikan karakter seolah-olah memantik orang-orang bergerak ke arah warna nasional pendidikan paksa-Cade Baru. Di semua kawasan pendidikan, tema ini penting untuk membentuk karakter yang dapat social-dalam masyarakat perhatian besar segenap elemen bangsa, kondisi demikian tidak boleh diabaikan, jika mencermati kehidupan kebangsaan yang akan tidak jelas arah berkecenderungannya setelah melawati periode krisis ekonomi politik sejak 1997-1999. Akhir periode kekuasaan Reformasi Soeharto pada Mei 1998 yang secara dramatis menjadi titik awal pertukaran nasib bangsa, adalah sebuah titik dakwah epata dengan politik pembangunanisme (*developmentalism*) terwujud seperti berujung kepada "kapal selam" kemahamahan mengkilik Cade Baru yang korup-korup, tetapi juga dalam-waktu bersamaan ada upaya reformasi-selam dalam hal yang positif-selam. Buku ini tidak berniat untuk mengkritik apa yang telah terjadi pendidikan semacam melalui program lingkaran pendidikan kewarganegaraan. Perus berpikir, program pendidikan karakter sebagai salah satu jalur pendidikan formal tidak menjamin keberhasilan tujuan nasional pembentukan karakter ideal warga negara, apalagi hanya melalui dibelajarkan-lajangnya kepada salah satu program kurikulum seperti Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak. Pendidikan Kewarganegaraan ini hanya pendidikan formal. Corakan model pendidikan karakter bisa berhasil jika didukung oleh keseragaman dan partisipasi segenap elemen, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan sekolah, dan pemerintah masing-masing lingkungan, untuk mewadukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan pendidikan karakter hanya akan menjadi poskus kosong, jika tidak ada kerangka di dalam masyarakat-jamahir. Dari situ, buku ini menyajikan perlunya strategi dan keberanian upaya penemuan karakter warga negara yang ideal sebagai sebuah kenyataan. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu aspek yang membantu memperkuat pembangunan karakter ke-selam. Buku ini semula merupakan masalah teresah yang kembali ditinjau untuk satu tema utama tentang apa yang telah terjadi pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter warga negara. Berhala dengan buku-buku lainnya yang mengupas pendidikan karakter, buku ini berusaha menyodorkan kerangka politik alas-belakang ke-selam-selam pendidikan karakter yang memiliki petaliran awal dengan wawasan kajian pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan kerangka tema buku, buku ini juga mengupas permasalahan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang akan berpengaruh oleh jalan politik nasional di setiap periode pemerintahan.



**Penerbit Buku Kompas**

Kantor: Gedung Banjarbaru Sarabadi  
Jalan. 0271-8420151, 081-31317077  
Email: [pbk.kompas@kompas.com](mailto:pbk.kompas@kompas.com)

ISBN 978-602-94884-1-2



**Samsuri**

**PENDIDIKAN KARAKTER  
WARGA NEGARA  
KRITIK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

**PENDIDIKAN KARAKTER WARGA NEGARA  
KRITIK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

Samsuri

Edisi Revisi

Cetakan Pertama, 2012

Hak Cipta (C) pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

## Pustaka Hanif

Kragilan, Kodipiro, Banjarsari Surakarta  
Telp. (0271) 5820157, 08121547055  
E-mail: pustakaharif@yahoo.com

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Samsuri

**PENDIDIKAN KARAKTER WARGA NEGARA  
KRITIK PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA**

Edisi Revisi - Surakarta, Pustaka Hanif, 2012  
vii + 98 blm, 1 jil.: 25 cm

ISBN: 978-602-8658-75-1

I. Civics

I. Judul

## KATA PENGANTAR

Tiba-tiba semua orang menjadi ahli "pendidikan karakter." Indikasi ini tampak menjelang dan beberapa saat setelah regulasi kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain menyuarakan gerakan pendidikan karakter dan akhlak mulia untuk semua jenjang sekolah. Dimulai dari konsep-konsep dan teori-teori, dengan perspektif yang beragam (seperti kearifan lokal, nilai tradisi, dan agama), hingga pedoman-pedoman operasional bersifat teknis, pendidikan karakter seolah menemukan ruang pergerakan baru dalam wacana nasional pendidikan pasca-Orde Baru. Di semua kawasan pendidikan, terna arti penting pembentukan karakter yang ideal seolah-olah menyedot perhatian besar segeopap elemen bangsa.

Kondisi demikian tidaklah mengherankan, jika mencermati kehidupan kebangsaan yang makin tidak jelas arah penyelesaiannya setelah melewati periode krisis ekonomi-politik sejak 1997-1998. Akhir periode kekuasaan Regim Soeharto pada Mei 1998 yang semula diharapkan menjadi titik awal perbaikan nasib bangsa, setelah sekitar tiga dekade dipacu dengan politik pembangunanisme (*developmentalism*), ternyata seperti berujung kepada "keputus-asahan." Ramai-ramai mengkritik Orde Baru yang korup, tetapi juga dalam waktu bersamaan ada upaya memiru rejim tersebut dalam hal yang perilaku serupa.

Buku ini tidak bermaksud memberikan peta jalan (*road map*) pendidikan karakter melalui program kurikuler pendidikan kewarganegaraan. Penulis berpendirian, program pendidikan karakter secara masif di jalur pendidikan formal tidak menjamin keberhasilan tujuan nasional pembentukan karakter ideal warga negara, apalagi hanya melulu dibebankan tugasnya kepada salah satu program kurikuler seperti Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan atau Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal. Gerakan masif pendidikan karakter bisa berhasil jika didukung oleh kesadaran dan partisipasi segenap elemen, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan sekolah, dan pemimpin di masing-masing lingkaran, untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan pendidikan karakter hanya akan menjadi pepesan kosong jika tidak ada konektivitas di antara unsur-unsur tersebut. Dari sinilah, buku ini menyuarakan perlunya sinergi dan kekompakan upaya pembentukan karakter warga negara yang ideal sebagai sebuah kenyataan. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu aspek yang berusaha memperkokoh pembangunan karakter tersebut.

Buku ini semula merupakan naskah terserat yang kembali dihimpun untuk satu tema utama tentang arti penting peran pendidikan kewarganegaraan membangun karakter warga negara. Berbeda dengan buku-buku lainnya yang mengupas pendidikan karakter, buku ini berusaha menyodorkan kerangka teoritik atas berbagai kepastiaan pendidikan karakter yang memiliki pertalian erat dengan wilayah kajian pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan kerangka tema buku, buku ini juga mengupas perjalanan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang amat dipengaruhi oleh bahkan politik nasional di setiap periode pemerintahan.

Penulis sangat menyadari bahwa ikhtiar penulisan buku ini sangat dipengaruhi oleh pergumulan pemikiran dan pengalaman pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, baik selama menjadi mahasiswa sejak di IKIP Yogyakarta sampai dengan di Universitas Pendidikan Indonesia maupun ketika mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pengaruh tersebut tentu saja terasa ketika penulis menaparkannya dalam bagian-bagian tertentu dalam buku yang di satu sisi cenderung mengkritik, tetapi juga berharap agar ada perubahan paradigma pendidikan kewarganegaraan ke depan yang tidak bergantung kepada pergantian rejim pemerintahan, tetapi seyogianya pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk memperkuat politik kenegaraan sebagaimana diidealkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kehidupan bernegara yang kuat hanya dapat dicapai jika warga negara memiliki fondasi nilai dan karakter yang kuat pula untuk menopang tantangan dan persoalan negara-bangsa di masa kini dan masa depan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendorong penerbitan buku ini. Kepada rekan sejawat di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, ucapan terimakasih dan penghargaan patut disampaikan atas dorongan dan kesempatan untuk menekuni kajian pendidikan kewarganegaraan secara intensif. Ucapan terimakasih perlu dihatorkan kepada Mas Solikhin (untuk penerbitan edisi pertama), yang tak henti-hentinya bersabar dan selalu merangsang penulis agar selalu kritis terhadap politik pendidikan karakter di Indonesia selama ini. Kepada para aktivis, pelaku kebijakan dan peminat pendidikan karakter serta kajian pendidikan kewarganegaraan, buku ini dihatorkan untuk mendapat tempat yang layak sebagai bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban penulis terhadap masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, September 2011

## KATA PENGANTAR EDISI REVISI

Edisi revisi ini dihadirkan dengan beberapa perbaikan dalam hal sumber kepustakaan maupun tata tulis yang bersifat teknis, tetapi sangat penting artinya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan komentar terhadap edisi pertama buku ini.

Terima kasih kepada Mas Muslih dari penerbit Pustaka Hanif yang telah membuka jalan penerbitan edisi revisi ini. Semoga berguna.

Yogyakarta, April 2012

The first part of the book is devoted to a general history of the United States from its discovery by Columbus in 1492 to the present time. It covers the early years of settlement, the struggle for independence, the formation of the Constitution, and the development of the nation as a great power. The second part of the book is devoted to a detailed history of the United States from 1877 to the present time. It covers the Reconstruction period, the Gilded Age, the Progressive Era, and the modern era. The book is written in a clear and concise style, and is suitable for use in schools and colleges.

The book is divided into two main parts. The first part, "The History of the United States from 1492 to 1877," is written by John P. Kennedy. The second part, "The History of the United States from 1877 to the Present," is written by John P. Kennedy and John P. Kennedy. The book is written in a clear and concise style, and is suitable for use in schools and colleges.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
PENDAHULUAN - 1 .....	1
<b>BAB 1 PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MEMBANGUN WARGA NEGARA IDEAL .....</b>	<b>6</b>
Pendahuluan .....	6
Ragam Model Program Pendidikan Karakter .....	6
Efektivitas Pendidikan Karakter .....	9
Membangun Karakter Bangsa: Pendidikan Karakter atau Pendi- dikan Kewarganegaraan? .....	11
<b>BAB 2 DIMENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .....</b>	<b>16</b>
Pendahuluan .....	16
Diskursus Negara dan Warga Negara .....	17
Pendidikan Karakter Warga Negara .....	22
Ragam Pengalaman Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mem- bangun Karakter Warga Negara .....	25
Tanggung Jawab Kurikuler Pembentukan Karakter Warga Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan .....	29
<b>BAB 3 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MEMBANGUN KARAKTER WARGA NEGARA .....</b>	<b>32</b>
Pendahuluan .....	32
Pembentukan Karakter Warga Negara Era Orde Baru .....	33
Posisi Strategis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengem- bang Karakter Warga Negara Demokratis .....	41
Pembentukan Karakter Warga Negara Era Reformasi .....	49
Karakter Demokratis Warga Negara .....	56

<b>BAB 4</b>	<b>INISIASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI</b>	
	<b>PEMBANGUN KARAKTER .....</b>	<b>65</b>
	Pendahuluan .....	65
	Pancasila Dasar Negara .....	66
	Pilar Konstitusi .....	70
	Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	72
	Pilar Bhinneka Tunggal Ika .....	73
<b>PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>81</b>
<b>INDEX .....</b>		<b>89</b>

## PENDAHULUAN

*Prinsip Ketuhanan! Bukan saja Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. ... Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoism-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan. ... jatuhkan agamamu, baik Islam, maupun Kristen dengan cara berkeadaban. (Pidato Ir. Soekarno di depan Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)*

*Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatukan bangsa Indonesia seluruhnya supaya dalam masa yang genting ini kita mewujudkan persatuan yang bulat maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari Undang-undang Dasar.*

*Oleh karena itu maka dapat disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi: "Presiden ialah orang Indonesia asli." "Yang beragama Islam", dicoret, oleh karena penetapan yang kedua: Presiden Republik Indonesia orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya menghalangi orang Islam yang akan menjadi Presiden sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum Undang-undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah di Indonesia yang tidak beragama Islam unipamanya yang ada pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun. (Drs. Moh. Hatta, dalam Sidang Pertama PPKI, 18 Agustus 1945)*

Dua kutipan pidato dua Bapak Bangsa (Sekretariat Negara RI, 1995) di atas, dalam peristiwa penting di awal pembentukan Republik Indonesia, sengaja disuguhkan untuk me-*refresh*-cita kebangsaan Indonesia yang sedang menghadapi ujian pasca-1998. Genaruh kehidupan berbangsa dan bernegara kita seolah mempertanyakan ulang tentang jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beradab, humanis, dan religius. Bagaimana bisa, bangsa Indonesia yang dikenal tamah-tamah, sopan-santun, tertib-rukun, bersahaja, setelah lebih dari satu dekade melewati era reformasi menjadi berubah 180 derajat. Wajah bangsa kita seperti kehilangan wajah asli, jati diri yang otentik. Bagaimana bisa, radikalisasi dan gerakan ekstrim-anarkhis menjadi pemandangan sehari-hari dalam ruang publik: *Terror Bom, Bom Bunuh Diri*, penyerangan satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya, dan seterusnya. Apa yang salah dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita?

Buku ini tidak bermaksud mendramatisir antara prinsip-prinsip kenegaraan dari para *founding fathers* Indonesia yang mengusung kehidupan berbangsa secara religius dan humanis dalam wajah ke-Indonesia-an yang berkeadaban (*civilized*).

dengan fenomena yang tengah berlangsung sekarang. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan untuk mengawal moralitas kenegarawanan dan semangat keagamaan dari para Bapak Bangsa itu, sebagai salah satu nilai pokok (*core value*) pendidikan karakter? Ini semata-mata bukan hanya politik pendidikan nasional sedang gegap gempita mengutamakan pentingnya pendidikan karakter. Namun, apa yang bisa diharapkan dari pendidikan karakter untuk menyemai nilai moral agama dan kenegarawanan sebagai teladan bagi generasi muda bangsa ini?

Ketika berbicara "pendidikan karakter", yang selalu ditakuti oleh penulis buku ini ialah pola pendidikan karakter yang akan mengikuti pola semacam penataran P4 di masa Orde Baru, yang oleh sebagian besar kalangan dianggap gagal. Karena dalam praktiknya penghayatan/pembentukan watak Pancasila bangsa selain cenderung indoktrinatif, juga acapkali melahirkan tindakan hipokrit kolektif. Pendidikan karakter dalam kerangka pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ialah dominasi jargon pembangunan "keselamatan semua" guna mendukung rejim kekuasaan yang ada, minimnya keteladanan, kurangnya pembelajaran yang bermakna.

Mengapa perlu pendidikan karakter, di tengah-teengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang dirundung kemalangan bertubi-tubi meski telah lebih dari enam dekade bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa merdeka? Pertanyaan ini mewakili pertanyaan banyak komponen bangsa Indonesia yang miris dengan pernyataan perlunya pendidikan karakter –terutama di masa Kabinet Indonesia Bersatu II— seiring dengan makin pudarnya kebanggaan dan jati diri sebagai bangsa beradab dan negara berdaulat.

Pembangunan karakter bangsa melalui instrumen politik pendidikan nasional di Indonesia sudah dimulai sebelum kritik terhadap model Pendidikan Pancasila era Orde Baru. Pada masa sebelumnya, Presiden Soekarno selalu menekankan pentingnya *nation and character building* dalam rangka membentuk manusia sosialis Indonesia yang berdasarkan Pancasila, melalui proses pedagogis yang bersifat revolusioner. Dengan demikian, "Pendidikan karakter" bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebelum periode Orde Baru, mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti "setara" dengan Pendidikan Agama (Departemen P.D. dan K, 1963), yang termasuk sebagai kelompok mata pelajaran dasar seperti *Civics* (Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, Sejarah Kehangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, dan Pendidikan Jasmani/Kesehatan. "Setara" maksudnya jika tidak diajarkan Pendidikan Agama, maka diganti dengan mata pelajaran Budi Pekerti.

Di masa Orde Baru, meskipun tidak ada sebutan khusus program kurikuler pendidikan karakter, keberadaan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menempati posisi dan peran seperti pendidikan karakter pada umumnya. PMP dan PPKn meskipun fokus pembentukan warga negara yang baik menjadikannya berbeda dari semata-mata program pendidikan karakter/budi pekerti, namun proses pedagogiknya cenderung menanamkan nilai-nilai Pancasila yang diderivasikan dari P4 seperti pendidikan karakter/budi pekerti pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan secara luas dalam salah satu bab di buku ini, P4 menjadi materi pokok PMP dan PPKn semenjak Ketetapan MPR 1978 tentang P4 itu lahir.

Di masa Orde Baru, karakter manusia Indonesia sebagai manusia pembangunan terencana dalam sejumlah Garis-garis Besar Haluan Negara *Manusia-manusia pembanguaan* memiliki karakter sebagai berikut: *sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, cerdas, berbudhi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, setia kawan, percaya pada diri sendiri, sikap menghargai jasa para pahlawan, inovatif dan kreatif, serta berorientasi ke masa depan* (diolah dalam Samsuri, 2010). Ciri-ciri karakter tersebut secara normatif dapat diterima oleh semua kalangan. Persoalannya, bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian ciri-ciri positif karakter tersebut, tampaknya tidak terselesaikan hingga gerakan reformasi bergulir. Pembentukan karakter warga negara cenderung sebagai retorika pembangunan seperti dalam jargon membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan manusia Indonesia berdasarkan Pancasila seakan menemukan "jalan buntu," ketika secara politik P4 dicabut oleh MPR dalam sebuah sidang istimewa bulan Nopember 1998. Padahal P4 inilah yang menjadi "mata air" dan "roh" dari pembentukan karakter warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan di persekolahan yang ketika itu bernama PMP dan kemudian PPKn. Dengan pencabutan P4, maka terdapat "kekolosongan" materi pokok dalam kajian PPKn terutama di sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Memasuki satu dekade era reformasi, jagad pendidikan Indonesia kembali diramaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang mengusung

pendidikan karakter lima tahunan melalui Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Masih kental di ingatan cakupan pendidikan di Indonesia, yakni ketika awal Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin berusaha menghidupkan pendidikan watak dan budi pekerti—sebagai amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1999—terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, meskipun gaungnya kemudian menjadi samar-samar dan hilang seiring dengan pembekhentian K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI oleh MPR pada Juli 2001.

Kebijakan pendidikan karakter tersebut seakan memperkuat pemeco lama di dunia pendidikan nasional Indonesia yang mengatakan bahwa “ganti menteri, maka ganti kurikulum atau ganti kebijakan.” Pemeco ini menyiratkan sedikitnya dua hal. Pertama, persoalan pendidikan akan selalu dikaitkan dengan arah politik atau kebijakan pendidikan nasional, sehingga antara pendidikan dan politik selalu berhubungan sangat kuat. Kedua, ada penyederhanaan anggapan bahwa persoalan pendidikan seakan hanya sebatas masalah kurikulum atau urusan kurikulum lembaga pendidikan formal.

Kebijakan pendidikan untuk membentuk karakter warga negara yang baik dalam sistem politik pun akan mempersoalkan bagaimana kebijakan pendidikan mengakomodasi kepentingan pemeliharaan nilai-nilai politik melalui proses pendidikan dengan kemampuan warga negara mengartikulasikan kepentingannya ke dalam kebijakan itu sendiri. Arti penting kehidupan demokrasi yang sehat dalam suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara mengandaikan pentingnya hubungan yang sehat pula antara negara dengan warganya. Dengan demikian, tidak mungkin demokrasi yang sehat dibangun dalam hubungan yang pincang dari salah satu komponen tersebut: negara kuat-warga negara lemah atau negara lemah-warga negara kuat. Negara kuat karena warga negaranya kuat merupakan idealisasi dalam segenap tatanan kehidupan bernegara secara modern.

Persoalannya, bagaimana membangun warga negara yang sehat sehingga mampu berhadapan, kritis, dan memelihara tatanan kehidupan bernegara secara demokratis. Ini tentu saja memerlukan upaya edukatif yang sejalan dengan upaya membangun sistem politik demokratis pula. Bagaimana karakter warga negara yang handal, cakap dan bertanggung jawab dapat dibentuk melalui program kurikulum khususnya pendidikan kewarganegaraan?

Buku ini berusaha mengekspose peran penting pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian pembentuk kepribadian bangsa (warga negara). Untuk itu,

pembahasan arti penting Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembangun karakter warga negara dibahas ke dalam empat bab. *Pertama*, pengkajian terhadap teori pendidikan karakter untuk membangun warga negara ideal. *Kedua*, dimensi pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara. *Ketiga*, kebijakan pendidikan kewarganegaraan sebagai pembangun karakter warga negara di Indonesia. *Keempat*, inisiasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pembangun karakter warga negara demokratis menghadapi problem kontemporer kebangsaan.

Buku ini dihadirkan dengan harapan dapat mengisi sisi-sisi kajian pendidikan karakter yang semenjak kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional pemerintah sekarang tentang pendidikan karakter digulirkan, banyak dilahirkan pikiran-pikiran dan model-model pendidikan karakter oleh sejumlah kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan pendidikan. Karena aksentuasi pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembangun karakter warga negara ideal, maka buku ini menyodorkan pemaparannya dari perspektif kajian kewarganegaraan.